

# **INDONESIA BARU DALAM PERSPEKTIF AGAMA**

*Oleh : Indo Santalia*

## **ABSTRAK**

Selama 32 tahun, mulai 1966 sampai 1998, Indonesia diperintah sebuah rezim yang bernama orde baru dengan one man show, Soeharto. Orde baru awal dengan komitmen dan kinerja akan membangun demokrasi dan kesejahteraan rakyat, tetapi kemudian berkembang menjadi otoriter (dictator konstitusional, istilah Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. LLM) dan berbudaya KKN yang menyengsarakan rakyat pinggiran.

Akibat dari performance orde baru tersebut, akhir paruh 1998 muncul gerakan reformasi yang dipelopori kalangan Perguruan Tinggi, yang akhirnya hanya dalam waktu empat pekan berhasil ditumbangnya, seraya melahirkan orde reformasi. Orde ini hingga kini telah dipresideni tiga orang, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari rentang ketiga presiden ini, mengawali esensi orde reformasi itu. Yang mencolok malah aksi unjuk rasa yang berstandar ganda.

Tulisan ini akan menyorot bagaimana Kontribusi perspektif agama (baca Islam) dengan melalui pemahaman reformasi yang benar dapat mengantarkan Indonesia ke suatu wajah Indonesia baru. Kata Kunci : Reformasi, Hak Asasi dan al-Qur'an.

## **I. PENDAHULUAN**

Adanya gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan orde baru dibawah rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, dengan kekuasaan yang represif yang didukung oleh kekuatan militer, monoloyalitas pegawai negeri, dan Ironi para konglomerat yang kolusi dengan elite kekuasaan, telah membangkitkan keberanian masyarakat untuk mengkritik dan mengoreksi habis-habisan atas perilaku KKN para penguasa atau pejabat pemerintah secara telanjang, seakanakan bangsa Indonesia baru saja memperoleh kemerdekaannya, sehingga dimana-mana semangat reformasi tumbuh bagai cendawan di musim hujan, yang ditandai oleh kebebasan unjuk rasa untuk menyatakan apa saja yang tidak disetujuinya.

Atas nama reformasi, unjuk rasa dianggap jalan pintas yang efektif untuk menyalurkan aspirasinya. Unjuk rasa dengan segala akibatnya, seringkali menimbulkan rasa takut, sehingga kata *reformasi* menjadi jenuh dipakai, karena adanya akses yang seringkali destruktif. Unjuk rasa, menjadi pedang bermata dua, satu sisi sangat positif untuk melakukan kontrol atas kekuasaan agar tidak menyimpang dan sewenang-wenang, sedangkan sisi yang lainnya adalah dampak negatif yang timbul ketika unjuk rasa, telah keluar dari koridor hukum, etika sehingga dapat mengaburkan esensi moralitas dari reformasi itu sendiri.

## **II. AGAMA, REFORMASI DAN HAK ASASI**

Dalam kaca mata agama (baca Islam), reformasi pada hakikatnya dapat dipandang sebagai suatu Sunnatullah, untuk melakukan perbaikan, perubahan dan penggantian dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, atau dari satu sistem ke sistem lainnya untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih merata untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Reformasi sebagai Sunnatullah, pada hakikatnya tidak bisa ditolak, dicegah atau dihentikan oleh siapapun, karena dalam setiap kehidupan di dalamnya sudah terdapat mekanisme reformasi yang bekerja secara otomatis (lihat Q.S 32, 38, 62; juga 35 : 43). Reformasi sesungguhnya suatu ketentuan yang dikandung oleh rahim kehidupan itu sendiri untuk menjaga dan melahirkan kehidupan, sehingga kehidupan dapat tetap dan terus berlangsung, sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam suatu paket edaran alam semesta.

Al-Qur'an menjelaskan jatuh banggunya bangsa-bangsa di dunia di masa lampau, juga jatuh banggunya para raja, para penguasa dan bahkan pergantian nabi-nabi; menjadi pertanda kejatuhan suatu kebudayaan. Puncak-puncak kebudayaan jatuh, bergeser dan berpindah, dari suatu bangsa atau negara tertentu, kepada bangsa atau negara lainnya. Puncak kebudayaan pernah bercokol di Timur, dicak kebudayaan akan terus berlangsung. Tengah dan di Barat, dan pergeseran puncak kebudayaan akan terus berlangsung.

Secara jelas, Al-Qur'an sesungguhnya menegaskan bahwa kejatuhan suatu bangsa, suatu kebudayaan dan suatu kekuasaan pada hakikatnya disebabkan oleh penyimpangan terhadap hukum-hukum yang secara kodrati inheren dalam setiap kehidupan itu sendiri. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan masya-

rakat itu antara lain hukum agama, hukum akal sehat, hukum kemanusiaan universal, dan juga hukum alam. Pelanggaran atas hukum-hukum itu dipandang sebagai tindakan kezaliman (lihat Q.S 10:13, juga 20:128). Tuhan akan menimpakan akibat kezaliman itu kepada mereka yang melakukannya, agar mereka mau mengambil pelajaran dan mau kembali ke jalan yang benar (lihat Q.S 30:41).

Dalam pandangan Al-Qur' an (lihat Q.S 31:40, juga 59:7) posisi kodrat manusia di muka bumi, baik secara individual maupun kolektif (masyarakat atau bangsa) tidak pernah mampu menggenggam kemutlakan (kebenaran atau kekuasaan). Oleh karena itu, mobilitas dan pergeseran dinamis dari kekuasaan harus dapat berjalan secara mulus, damai bergiliran, bergantian dan berbagi sesamanya. Sementara kebenaran pada hakikatnya tidak dapat dimonopoli oleh manusia siapapun, baik secara perorangan maupun kolektif. Pada tatanan ini, agama menegaskan perlunya perubahan, perbaikan dan pembaharuan terus menerus, agar secara kualitatif kehidupan manusia meningkat, bergerak, memasuki dimensi transenden.

Oleh karena itu, setiap bentuk pemutlakan, baik kekuasaan maupun kebenaran, pada hakikatnya bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri. Seseorang boleh meyakini kebenarannya sendiri, bahkan boleh saja mengklaim sebagai kebenaran mutlak, akan tetapi klaim atas kebenaran mutlak itu hanya diper-bolehkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk pihak lain, karena dalam realitas actual kehidupan, masing-masing individu dibatasi oleh individu yang lainnya. Oleh karena itu, al-qur'an (lihat Q.S 49:13, juga 5:48) secara tegas meletakkan pluralitas (suku, agama, kebudayaan) sebagai realitas kehidupan eksistensinya harus tetap dijaga dan dipelihara, melalui pengembangan sikap saling pengertian, saling menghargai, dan kesediangertian. saling menghargai. dan kesediaan untuk bermusyawarah atas persoalan-persualan yang dihadapi bersama di dalam kehidupan bermasyarakat.

### **III. AGAMA DALAM INDONESIA BARU**

Gerakan reformasi telah menumbuhkan harapan lahirnya Indonesia yang baru. Indonesia yang terbuka, dinamis dan demokratis. Indonesia yang baru sebagai wujud dari gerakan reformasi harus dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kesalahan rezim orde lama maupun rezim orde

baru. Reformasi tidak boleh diletakkan sebagai panglima yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sebagaimana orde lama yang telah meletakkan politik sebagai panglima. Reformasi tidak boleh melanggar kaidah-kaidah hukum dan moralitas universal.

Oleh Karena itu, Indonesia yang harus diletakkan sebagai proses, bukan sebagai produk yang sudah final, yaitu proses mencairnya nilai-nilai pluralisme ke-Indonesiaan ke dalam entitas paduan yang baru, mencari bentuk sintetik yang baru, yang dinamis (berubah terus), menjadi tesa-tesa harus yang terbuka dan demokratis. Pada dataran ini, diperlukan adanya sikap mental yang dapat menghargai perbedaan pendapat serta kemampuan mengelola perbedaan pendapat itu secara kreatif dan produktif untuk meningkatkan kualitas ke-Indonesiaan harus dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama. Ekonomi, politik, kebudayaan dan agama.

Indonesia baru sebagai proses, harus dapat memberikan kemungkinan perubahan secara fundamental dalam tata kehidupan sosial, politik dan ekonomi, sehingga negara kesatuan Indonesia dapat tetap terjaga dan berlangsung sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi.

Oleh karena itu, perubahan UUD '45, bentuk negara serta manajemen penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola kegiatan ekonomi dan politik adalah sudah sewajarnya untuk dapat dibicarakan secara terbuka, asal masih dalam kerangka dan koridor ke-Indonesiaan.

Di sisi lain, berbicara tentang agama, dapat dilihat bahwa sejarah agama dimulai dari kehadiran seorang nabi yang mengaku sebagai utusan Tuhan dengan dibuktikan perolehan firman yang diterimanya, sebagai jalan untuk mencapai tingkatan kualitas hidup menyatu dengan Tuhannya. Melalui penyatuan hidup dalam firman, seseorang akan memperoleh bimbingan, keselamatan dan kebahagiaan hidup yang hakiki, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Interaksi sosial seorang nabi dalam usaha mengajak masyarakatnya mematuhi ajaran agama pada gilirannya telah melahirkan adanya gerakan sosial yang besar, tidak saja berdimensi kultural, tetapi juga berdimensi structural, dengan adanya perombakan struktur masyarakat yang ada, menjadi masyarakat baru yang egaliter, yang kemudian menentukan posisinya dalam sejarah umat

manusia. Gerakan sosial keagamaan seringkali menjadi kekuatan perubahan besar besaran yang bercorak radikal dan total.

Dalam kehidupan masyarakat agama memahami firman, maka sebuah selalu diletakkan sebagai suatu kebenaran mutlak. Kemutlakan firman semata-mata karena kemutlakan Tuhan yang berfirman. Oleh karena itu, semua masyarakat agama memandang firman Tuhan adalah mutlak kebenarannya. Kemutlakan firman sepenuhnya berlaku internal, yaitu ke dalam firman itu sendiri. Sementara itu, pemahaman dan penafsiran manusia terhadap firman dan penafsiran seseorang dalam memahami suatu firman. Penafsiran firman karena sumber dari manusia, maka kebenarannya sepenuhnya bersifat nisbi, relatif dan tidak pernah mutlak.

Demikian pula halnya, klaim atas kebenaran suatu agama hanya berlaku untuk internal agama itu sendiri, karena ketika klaim kebenaran mutlak suatu agama akan diberlakukan untuk pihak agama yang lain, maka masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk mengklaim kebenaran mutlak agamanya. Padahal, agama sendiri melarang kekerasan dalam segala bentuknya dan mengajarkan untuk mencintai seseorang sebagai mana ia mencintai dirinya sendiri.

Agama pada hakikatnya merupakan wujud pergulatan spiritual yang mendalam antara seorang individu dengan Tuhannya. Sebagai pergulatan spiritual dengan Tuhan, maka agama sarat dengan muatan kegaiban, sehingga pengalaman keagamaan sesungguhnya bersifat sangat individual, yang dirajut dalam sebuah pengalaman batin seorang individu yang berhadapan dengan Tuhannya. Pada tahap ini, institusi agama ada pada individu yaitu dalam dimensi batinnya, bersemayam pada keyakinan terdalam seorang individu yang bebas, dalam rongga hati kemanusiaannya yang esensial yang memungkinkan seorang larut dalam kerinduan, keharuan dan kepasrahan yang total kepada Tuhannya.

#### **IV. PENUTUP**

Agama dalam Indonesia baru perlu dikembangkan ke arah pengayaan dimensi batin seorang individu dengan keterbukaan dan toleransi yang besar untuk menerima kebenaran agama orang lain dan menghargainya sama seperti ia menghargai agamanya sendiri. Agama pada hakikatnya untuk manusia,

bukan manusia untuk agama. Agama berpihak pada pembebasan dan pemberdayaan individu dan masyarakat secara total. Oleh karena itu, intitusi agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia baru, seharusnya menjadi institusi pembebasan dan pemberdayaan.

Dalam hubungan ini, adanya partai politik yang berdasarkan agama dapat dimengerti sebagai ekspresi dari hak azasi manusia. Akan tetapi persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menjaga agar aspirasi politik keagamaan yang secara substantial diperlukan dapat memperkuat komitmen moral pada pembebasan dan pemberdayaan. Dalam hubungan ini, maka institusi partai politik keagamaan harus dipandang sebagai alat perjuangan untuk pembebasan dan pemberdayaan, bukan tujuan perjuangan. Sebagai alat perjuangan, partai politik keagamaan selayaknya tetap menjadi institusi yang profan, bersifat sementara, relatif nisbi dan tidak mutlak.

*Wallahu A'lain bi al-Shawab.*